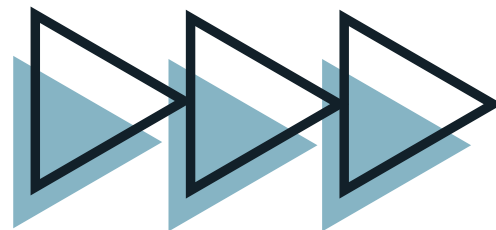




CASCADING

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



INDUKTOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	1. Nilai PMTB 2. Nilai ICOR																																																																									
SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Meningkatnya realisasi investasi													Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan																																																												
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Nilai Realisasi Investasi													Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan dan penanaman modal																																																												
PROGRAM (SIPO)	1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL													2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					5. PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					6. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																								
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	1.1. Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Gresik													2.1. Meningkatkan minat investor terhadap peluang investasi					3.1. Meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)					4.1. Meningkatkan penerbitan izin/sertifikat/NIB/ persetujuan/surat pernyataan					Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan					Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah																																								
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Persentase peningkatan jumlah investor													Persentase calon investor yang merealisasikan investasi					Persentase calon investor yang merealisasikan investasi					1. Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal 2. Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal					Rerata persentase capaian kinerja program																																													
KEGIATAN (SIPO)	1.1. PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1.2. PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA					2.1. PROMOSI PENANAMAN MODAL					3.1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					4.1. PELAYANAN PENANAMAN MODAL					5.1. PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					6.2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					6.3. ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					6.4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					6.5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6.6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	1.1.1. Meningkatkan kemitraan usaha besar dan menengah dengan UMK (outsourcing dengan Disubperindag)													1.2.1. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi daerah					2.1.1. Meningkatkan jumlah investor PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Gresik					3.1.1. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal					3.1.2. Meningkatkan kualitas efektivitas fasilitasi penyelesaian kendala pelaku usaha					4.1.1. Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan					5.1.1. Meningkatkan kualitas dan keterintegrasi data serta informasi perizinan dan nonperizinan daerah					6.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					6.2.1. Tersedianya jasa administrasi keuangan perangkat daerah					6.3.1. Tersedianya jasa administrasi kepegawain perangkat daerah					6.4.1. Tersedianya jasa administrasi umum perangkat daerah					6.5.1. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					6.6.1. Meningkatkan kondisi dan keberfungsian barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah					
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Persentase usaha besar dan menengah yang bermitra dengan UMK													Persentase peta potensi investasi Kabupaten yan tersusun					IK 1 : Jumlah investor PMA yang masuk IK 2 : Jumlah investor PMDN yang masuk					Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti pengawasan					Persentase penyelesaian permasalahan/ hambatan pelaku					Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan					Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi					Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang disediakan					Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah					Jumlah administrasi kepegawain perangkat daerah					Jumlah administrasi umum perangkat daerah					Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah					
SUB KEGIATAN (SIPO)	1.1.1.1. FASILITASI KEMITRAAN YANG DIUKUTKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		1.1.1.2. REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERBASIS RISIKO		1.1.1.3. PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL		1.2.1.1. PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA		1.2.1.2. PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.2.1.3. PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH ADA SISTEM PIR		2.1.1.1. PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		2.1.1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.1.1.1. PENGAWASAN PENANAMAN MODAL		3.1.1.2. BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA		1.1.1.1. PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MERELIASIKAN KEGIATAN USAHANYA		4.1.1.1. KOORDINASI DAN SINERONISASI PELAYANAN LAYANAN PENERBITAN EMERBIAAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH		4.1.1.2. PENYEDIAAN & PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERBASIS RISIKO		4.1.1.3. PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI & LAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERBASIS RISIKO		4.1.1.4. PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK		5.1.1.1. PENGOLAHAN, PENYAJIAN, & PEMANFAATAN DATA & INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK		6.1.1.1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		6.1.1.2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		6.2.1.1. PENYEDIAAN GAI DAN TUNJANGAN ASN		6.2.1.2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD		6.3.1.1. PENDIDIKAN DAN RELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		6.4.1.1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		6.4.1.2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		6.4.1.3. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		6.4.1.4. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGGARAN		6.4.1.5. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		6.4.1.6. PENYELANGGARAN RAPAT KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		6.4.1.7. DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		6.5.1.1. PENYEDIAAN JASA SUBAT MENYURAT		6.5.1.2. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		6.5.1.3. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		6.6.1.1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN		6.6.1.2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		6.6.1.3. PEMELIHARAAN MEBEL		6.6.1.4. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		6.6.1.5. PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA		6.6.1.6. PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	
SASARAN SUB KEGIATAN (SIPO)	Terlaksananya fasilitasi kemitraan antara usaha besar dengan menengah dengan UMK		Tersusunnya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang telah dengan ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan Penanaman Modal		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten		Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)		Terlaksananya pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal		Terselenggaranya promosi penanaman modal		Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pengawasan perizinan perusahaan		Terlaksananya sosialisasi/fasili tasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan pemberian perizinan fasilitas dan insentif daerah		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan kualitas pelaporan secara elektronik		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan secara elektronik		Tersedianya data dan informasi perizinan berusaha yang akurat dan bermanfaat		Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah		Meningkatnya kuantabilitas dan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah		Terpenuhinya hak dan kesejahteraan ASN secara tepat waktu		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaporan kinerja perangkat daerah		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN sesuai tugas dan fungsi		Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan untuk mendukung kelancaran pelayanan perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas		Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas		Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan pelayanan		Tersedianya bahan dan informasi dalam pelaksanaan perundang-undangan sebagai sumber informasi dan		Meningkatnya koordinasi dan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan		Terpenuhinya kebutuhan layanan komunikasi surat menyurat untuk mendukung kelancaran administrasi		Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum dalam mendukung kelancaran operasional kantor		Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik dan layak digunakan		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/la pangin dalam pelaksanaan tugas		Terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi baik dan berfungsi optimal		Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik dan layak digunakan		Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan							
INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPO)	Jumlah usaha besar dan menengah yang difasilitasi untuk bermitra dengan UMK		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah promosi penanaman modal		Jumlah pengawasan modal		Jumlah pelaku usaha yang mendapat sosialisasi/fasili tasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam mereliasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insenti f yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Nota		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pengerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Otakan dan Pengandaan yang Disediakan		Jumlah Laporan Pengelenggaraan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum dan Disediakan		Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi													